



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

POSITIF

KATEGORI BERITA:

NETRAL

NEGATIF

Keterlaluhan Kalau Target PAD Retribusi Kebersihan Tak Tercapai

TUBEI - Bupati Lebong, Kopli Ansori meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lebih optimal memungut retribusi kebersihan dan pemakaian kendaraan bermotor.

Tahun 2024 ini DLH hanya dibebankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp24 juta untuk retribusi kebersihan dan penggunaan kendaraan bermotor. "Artinya Rp2 juta sebulan, keterlaluhan kalau dengan angka segitu realisasi PAD retribusi kebersihan dan penggunaan kendaraan bermotor tidak juga tercapai," kata Bupati.

Mengingat sumbangsih retribusi kebersihan dan penggunaan kendaraan bermotor untuk keseluruhan PAD sektor retribusi daerah, persentasenya sangatlah kecil.

Retribusi kebersihan tidak sampai 0,1 persen karena dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong tahun 2024 target retribusi daerah ditetapkan Rp31,6 miliar.

"Apalagi dalam pelayanan kebersihan Pemkab Lebong sudah menyerahkan kepada pihak ketiga, tentunya pemungutan retribusi kebersihan menjadi lebih mudah," terang Kopli.

Dari penyewaan truk sampah saja diyakini bisa menghasilkan retribusi kebersihan dan penggunaan kendaraan bermotor yang berlipat dari nilai PAD yang ditargetkan. Intinya dengan pelayanan kebersihan yang diklaim telah meningkat, diharapkan sejalan dengan capaian PAD.

Namun agar pemungutan retribusi kebersihan berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan, DLH Kabupaten Lebong tetap harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Dalam artian, jangkauan pelayanan tetap harus diperluas sehingga pengangkutan sampah seluruh masyarakat di Kabupaten Lebong terlayani.

Terpisah, Kepala DLH Kabupaten Lebong,

Joni Prawinata, SE, M.Si mengaku akan terus memaksimalkan kinerja pemungutan retribusi kebersihan guna mencapai PAD yang telah ditargetkan.

Bahkan pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin karena tidak menutup kemungkinan bisa melampaui dari nilai yang telah ditargetkan.

Adapun objek retribusi kebersihan adalah masyarakat yang berada di wilayah pelayanan kebersihan. Contohnya, pemukiman masyarakat, lokasi pasar hingga kompleks perkantoran yang terjangkau diangkut sampahnya.

Petugas yang melakukan penagihan juga sudah dibekali surat tugas dan karcis retribusi sehingga lebih memudahkan jalannya pemungutan retribusi kebersihan.

"Dengan pengelolaan yang dipihakigakan, masyarakat bisa merasakan dan menilai sendiri seperti apa pelayanan kebersihan yang kami berikan," jelas Joni.

Diharapkan, masyarakat juga bisa mengimbangi pelayanan pengangkutan sampah yang sudah semakin membaik itu dengan taat membayar retribusi kebersihan.

Selain dari retribusi kebersihan, pihaknya juga akan mengoptimalkan PAD dari kendaraan angkutan sampah yang saat ini sudah disewakan kepada pihak ketiga.

"Nanti akan kami kirimkan tagihan sewanya sesuai kontrak dan pihak ketiga bisa langsung menyetorkan PAD sewa kendaraan angkutan sampah ke kas daerah," ungkap Joni.

Lebih lanjut Joni mengingatkan agar masyarakat di Kabupaten Lebong proaktif menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing.

Salah satunya dengan meningkatkan kegiatan sosial kebersihan lingkungan yang pelaksanaannya terjadwal dengan rutin.

Atau paling tidak, masyarakat mendukung

kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta tidak boleh membuang sampah di aliran sungai.

Menurutnya, masalah kebersihan merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja.

"Apalagi Kabupaten Lebong sudah memiliki Perda (peraturan daerah, red), jika masyarakat kedapatan membuang sampah sembarangan akan disanksi membayar denda," jelas Joni.

Diketahui, sepanjang tahun 2023 DLH Kabupaten Lebong berhasil menyumbang PAD hingga Rp70 jutaan melalui sektor sewa kendaraan angkutan sampah.

Artinya DLH telah berhasil menaikkan 3 kali lipat retribusi kebersihan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika pelayanan pengangkutan sampah masih dikelola secara langsung oleh DLH.

Berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga pelayanan kebersihan, sewa atas penggunaan 3 unit truk sampah ditetapkan Rp7,5 juta sebulan.

Nilai yang diterima itu sudah bersih karena untuk pemeliharaan truk dan ongkos produksi pengolahan sampah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

Bahkan dengan jumlah truk yang dimiliki DLH Kabupaten Lebong saat ini, pelayanan persampahan diklaim sudah hampir mencapai 50 persen. Yakni sudah menjangkau 8 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Lebong, walaupun belum seluruh desa dalam satu kecamatan bisa terlayani.

Belum tersentuhnya pelayanan kebersihan secara keseluruhan dipengaruhi keterbatasan armada angkutan sampah yang dimiliki DLH Kabupaten Lebong. Namun ke depan DLH akan terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan dengan penambahan armada sampah. (sca)